

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN GUBENUR NOMOR 544/DISPENDA/2016 TENTANG
PENGHAPUSAN DENDA PAJAK
DAN BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat)**

**OLEH :
ANDI ODDANG RIUH HUTOMO,S.I.K.
NPM.A2021131084**

ABSTRACT

This thesis discusses the optimization of the implementation of the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 Concerning Public service levies in order to increase revenue. The method used in this research is a sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that implementation of the Regional Regulation No. 3 of 2011, especially regarding the Service Fees for market, the government set targets to be achieved or realized annually. In the Year 2012 revenue target of approximately Markets Service Fees meet government expectations Singkawang, this is due to the management levy less orderly market. To overcome this, local governments need to implement the following measures, identify and re-registration of the mandatory levy in order to get accurate data and more easily implement pemunggutan market retribution. In addition to these prevention efforts. It also occurs in Health Service Retribution either be collected based on the Regulation of City of Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies contributed enormously in revenue structure of Public service levies for the Local Revenue Singkawang. However, the amount of revenue from levies Health Service is also coupled with the magnitude of budgeting in the budget to provide health services to people in Singkawang. barriers caused not optimal implementation of the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies is lack of socialization of the Regulation to the officers and the community resulted in the implementation of public services at less than the maximum, infrastructure or physical facilities inadequate and human Resources are not fully support becomes less maximal optimalisai implementation Singkawang Regional Regulation No. 3 of 2011 on Public service levies. What efforts should be done by the Government Singkawang in order to implement the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies in order to increase revenue is by increasing the dissemination to the public about the content of regulation, to revise the content of the regulations by adding legal sanctions pemugutan firmly in the public service levies and provide training / education and training to the officers of the local regulation ..

Keywords: Optimization, Public service levies, Increase Revenue, Local First.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kebijakan penghapusan denda pajak berdasarkan surat keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak Dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif - sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, seharusnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Diharapkan kebijakan penghapusan denda pajak yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. dan pembebasan BBNKB dapat mendorong masyarakat untuk wajib pajak Kendaraan Bermotor segera melunasi pajaknya. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ialah Faktor Kesadaran masyarakat, Faktor meningkatkan kewajiban moral wajib pajak, dan Faktor pengetahuan tentang pajak. Upaya-Upaya Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Memotivasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Dalam Memotivasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak ialah Sebagaimana disebutkan yang dimaksud dengan motivasi adalah suatu hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu. Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. motivasi dari wajib pajak adalah kesadaran pajak dari wajib pajak, tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak. Motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan kuesioner yang digunakan untuk mengukur motivasi adalah Kesadaran pajak dari wajib pajak, Kejujuran wajib pajak, Hasrat wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan, Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor.

Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Konsekuensi atas paham kedaulatan rakyat adalah kekuasaan penguasa bersumber pada kehendak rakyat. Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi atau kehendak rakyat dan mengikat penguasa karena dikehendaki dan sesuai peri kehidupan rakyat. Hal ini disebabkan karena negara pada hakikatnya merupakan produk perjanjian diantara rakyat sehingga setiap hukum akan mengikat sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan presiden (pemerintah) . Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat terhindarkan apabila pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku.¹

Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan. Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kewajiban untuk meninggikan kesejahteraan umum. Dengan melalui perumusan peraturan perundang-undangan yang melahirkan kebijakan demi berjalannya pembangunan nasional yang merata di setiap

¹ Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 2

daerah.

Usaha untuk peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan reformasi dibidang perpajakan ialah perubahan dari *official assessment System* menjadi *self assessment System*. *Self assessment System*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, kepercayaan dan tanggung jawab penuh juga diberikan kepada Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengelolah dengan baik hasil pajak yang dilaporkan langsung oleh wajib pajak agar diharapkan kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak terus meningkat dengan terealisasinya pembangunan yang merata di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan diserahkannya kewenangan pengaturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada Pemerintah Daerah

Provinsi, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat ini, dasar hukum pengaturan PKB dan BBNKB adalah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2010.

Atas dasar Peraturan Daerah tersebut Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011 dan Estimasi Penerimaan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel : 1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014

No	Jenis Penerimaan	Tahun	
		Realisasi 2014 (Rp)	Estimasi 2015
1	PKB	195.995.463.035,00	209.388.666.185,00
2	BBN-KB	260.930.039.300,00	284.721.109.100,00
3	Pajak Alat Berat	753.063.453,00	
4	PKA	106.725.500,00	
5	BBN-Alat Berat	150.206.000,00	
6	BBN-KA	2.732.000,00	
7	PAP/ABT	969.374.350,00	
JUMLAH		458.907.603.638,00	

Sumber : Dispenda Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan data Tabel : 1 di atas menunjukkan kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 lebih besar dibanding obyek pajak lainnya yaitu :Pajak Kendaraan Air (PKA) ; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKA); Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sungguhpun demikian perlu dicermati, bahwa besaran PKB dan BBNKB yang diterima oleh daerah provinsi dari tahun ke tahun hakikatnya mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Ada/tidaknya penerapan Surat Pemberitahuan PKB, kinerja pelayanan kepada wajib pajak melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan SAMSAT keliling, kualitas sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan antara propinsi/kabupaten/kota, jumlah jual beli kendaraan bermotor, jumlah dealer kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua yang memberikan kemudahan kredit pembelian kendaraan bermotor, penambahan jenis kendaraan bermotor, serta kemudahan angsuran dan uang muka kendaraan bermotor yang di jual secara kredit kepada konsumen.
2. Kemampuan manajemen PKB dan BBN KB yang rendah. Hal ini mengakibatkan pemungutan PKB dan BBNKB cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
3. Kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah. Mengakibatkan terjadinya kebocoran-kebocoran baik dalam penerimaan maupun pengeluaran daerah yang sangat merugikan bagi pembangunan daerah.

Dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan guna meningkatkan PAD, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan berbagai cara yang dinilai efektif, diantaranya dengan adanya kebijakan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 544/Dispenda/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak Dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan ini diambil karena ada dugaan cukup banyak pemilik kendaraan di masyarakat yang menunggak pembayaran PKB dan BBNKB baik karena

merasa kendaraannya sudah tua ataupun karena kelalaian, keengganan, tidak mampu, atau takut membayar denda PKB dan BBNKB.

Dinas Pendapatan Daerahnya memperkirakan sekitar sebanyak 35 ribu kendaraan selama tahun 2014-2015 tidak membayar pajak. Dari jumlah itu, mayoritas merupakan kendaraan bermotor roda dua. Dengan adanya pemutihan pajak, maka penunggak pajak tidak perlu membayar keseluruhan tunggakan pajak. Mereka hanya perlu membayar pajak tahun berjalan ditambah dengan denda. Misalnya kendaraan yang pajaknya menunggak lima tahun maka wajib pajak hanya membayar pajak tahun ini, kemudian ditambah sanksi administrasi selama tahun berjalan. Demi mempermudah masyarakat membayar PKB, SAMSAT Provinsi Kalimantan Barat juga membuat aplikasi pengecekan pajak melalui Short Message Service (SMS), sehingga masyarakat bisa mengakses info PKB dari mana saja.

Banyaknya kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Barat, seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan lebih penerimaan pajak dari sektor ini, tapi dilihat dari realisasinya pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini karena beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Chau dan Leung² berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undangundang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif.

² Chau, Gerald dan Patrick Leung. 2009. *A Critical Review Of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis*. Journal Accounting and Taxation Vol.1 (2). Hong Kong Polytechnic University. Hung Hom, Kowloon, Hongkong hal 39

Franzoni dalam Carolina dan Fortunata ³ menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (tax compliance) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari banyak perspektif : kecenderungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka.

Menurut Rahayu⁴ kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Susanto ⁵ yang harus diubah dalam pemikiran masyarakat ada beberapa hal , salah satunya prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus diubah menjadi prasangka yang baik, untuk merubah hal tersebut tentu harus menciptakan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas. Menurut Feld dan Frey⁶ (2007:110), Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas dari pemerintah. Selain pelayanan yang dilakukan dengan baik diperlukan juga adanya sanksi yang

³ Carolina, Verani., Fortunata, Riana. 2013. "Tax Fairness Perception and Tax Compliance: Studi Empirik Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di Bandung. Hal 4

⁴ Rahayu, Siti. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal Yogyakarta hal 141

⁵ Susanto, Herry., 2012. "Juara II Lomba Artikel Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak". Melalui www.pajak.go.id.

⁶ Feld, L. P. and Frey, B. S., (2007), "Tax Compliance as the Result of Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation". *Volume 29, Issue 1, LAW & POLICY*. Hal 2

menjadi kontrol bagi wajib pajak, sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Muliari dan Setiawan banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pelayanan fiskus yang baik, penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, agar ketentuan pajak dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Adanya permasalahan di atas, menarik minat penulis untuk mendalaminya lebih lanjut melalui penelitian tesis dengan judul: **ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBENUR NOMOR 544/DISPENDA/2016 TENTANG PENGHAPUSAN DENDA PAJAK DAN BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian seperti tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak Dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak Dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ?

3. Upaya-Upaya Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Memotivasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak ?

Pembahasan

- A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.**

Untuk Mencapai tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju maupun berkembang. bahwa salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kebijakan penghapusan denda pajak berdasarkan surat keputusan gubernur nomor 544/dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai berikut :

1. Faktor Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak

dapat dijamin. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

2. Faktor meningkatkan kewajiban moral wajib pajak

Satu karakteristik yang berbeda adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain, inilah norma individu atau kewajiban moral. kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu. dimana tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat.

3. Faktor pengetahuan tentang pajak

Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Beberapa faktor-faktor lainnya seperti pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, sosialisasi mengenai perpajakan, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Oleh karena itu kualitas pelayanan perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan pandangan yang baik dari wajib pajak. Pelayanan petugas pajak yang kooperatif, jujur, menegakkan aturan perpajakan, tidak mempersulit, dan tidak mengecewakan wajib pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak. Keramah-tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan yang

diberikan kepada wajib pajak dengan membuat sistem pendukung. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Agar kemudahan dari sistem perpajakan dapat berjalan dengan baik dan dimengerti masyarakat, sosialisasi mengenai perpajakan diperlukan. Dengan sosialisasi tersebut masyarakat akan lebih memahami masalah-masalah seputar perpajakan, kemudahan yang bisa didapat, dan memahami peraturannya yang sering berubah-ubah. Dengan pemahaman yang baik diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah sebagai berikut :

a. Kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah

Kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah tercermin dari substansi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, yang meliputi pengaturan jenis pajak dan administrasi pajak daerah sebagai berikut:

I. Pengaturan jenis pajak daerah

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Nama, Obyek dan Subyek PKB :⁷

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. kereta api; b.

⁷ Selengkapnya lihat Pasal 1 s.d. Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

b. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan PKB:⁸

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Bobot sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut: a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan b. koefisien lebih

⁸ *Ibid*, Pasal 6 s.d. Pasal 9.

besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor: a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama; d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor: a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor; b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis

mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder. Khusus untuk kendaraan yang dioperasikan di atas air, dasar pengenaan pajak merupakan hasil penjumlahan nilai jual mesin dengan nilai jual body/rangka kendaraan air.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi/badan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma limapersen) untuk kepemilikan kendaraan pertama. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi dihitung secara progresif dan ditetapkan sebagai berikut:

- a) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5 %;
- b) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2 %;
- c) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5 %;
- d) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 3 %;
- e) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima sebesar 3,5 %;

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/TNI/POLRI, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kendaraan Bermotor umum sebesar 1 %;
- b) Kendaraan Bermotor lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah sebesar 0,5 %.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2 % (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif Pajak Kendaraan di air sebesar 1,5%.

c. Pendaftaran/Registrasi, Pelaporan dan Wilayah Pungutan Pajak:⁹

Setiap Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan wajib mendaftarkan/registrasi kendaraannya pada instansi yang ditunjuk di Daerah. Batas waktu untuk mendaftarkan kendaraan dimaksud ditentukan sebagai berikut: a. Bagi kendaraan baru atau yang belum pernah terdaftar, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak

⁹ *Ibid*, Pasal 10 s.d Pasal 13.

saat kepemilikan dan/atau penguasaan; b. Bagi kendaraan pindahan yang telah terdaftar di Daerah lain, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Dokumen Administrasi pemindahan tempat pengoperasian kendaraan. Kendaraan yang telah terdaftar di Daerah wajib untuk didaftar-ulang paling lambat pada saat berakhirnya masa pajak.

Setiap Objek Pajak yang didaftarkan atau telah terdaftar, wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada saat pendaftaran atau setiap kali masa pajak berakhir. Pelaporan tersebut harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa, termasuk apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin. Tata cara pelaporan objek pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Wilayah pemungutan pajak adalah di Wilayah Daerah.

d. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak:¹⁰

Masa pajak ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan yang baru pertama kali terdaftar masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut dari saat pendaftaran. b. Kendaraan daftar ulang masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut sesuai dengan masa pajak tahun sebelumnya. c. Kendaraan lelang/dump milik Pemerintah, TNI/POLRI masa Pajak 12 (dua belas) bulan sejak pendaftaran dengan kewajiban pajak yang timbul atau seharusnya terutang sejak saat objek dikuasai dan/atau dimiliki berdasarkan tanggal penetapan keputusan lelang/dump. d. Kendaraan yang melanggar ketentuan batas waktu

¹⁰ *Ibid*, Pasal 14 s.d. Pasal 17.

pendaftaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan: 1) masa pajak pertama kali dihitung sejak berakhirnya batas waktu pendaftaran sampai dengan saat pendaftaran; 2) masa pajak berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Kewajiban pajak yang berakhir sebelum masa pajak berakhir karena sesuatu hal, maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari, dihitung 1 (satu) bulan penuh. Saat pajak terutang adalah sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan terdaftar. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) terhadap kendaraan yang penguasaannya dan pengoperasiannya telah dipindahkan kepada perwakilan Badan Usaha di Wilayah Daerah dengan kewajiban kendaraan didaftarkan di Daerah. Tetapi hal ini dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Maka Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak perlu lagi.

e. Penetapan PKB:¹¹

Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor, dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bentuk isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

¹¹ *Ibid*, Pasal 18 s.d. Pasal 20.

Pelanggaran batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang.

Perubahan fungsi atas kendaraan yang mengakibatkan terjadinya penurunan pokok pajak dalam satu masa pajak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Tatacara perhitungan kompensasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

II. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a. Nama, Objek dan Subjek BBNKB:¹²

Pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor dinamakan BBNKB. Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor :

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan Kendaraan Bermotor dimaksud tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor

¹² *Ibid*, Pasal 21 s.d. Pasal 23.

adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di daerah, kecuali: a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; b. untuk diperdagangkan; c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Subjek Pajak BBNKB meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib Pajak BBNKB meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

b. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Perhitungan BBN-KB:¹³

Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut : a. penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih sebesar 10% (sepuluh persen); b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Tarif BBNKB untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan) jalan umum, tarif pajak ditetapkan sebagai berikut: a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Tarif BBNKB yang dioperasikan di air ditetapkan sebagai berikut: a. untuk penyerahan pertama sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen); b. untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen). Besaran pokok Pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan cara

¹³ *Ibid*, Pasal 24 s.d. Pasal 26.

mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10).

c. Pendaftaran, Pelaporan Dan Wilayah Pungutan Pajak:¹⁴

Orang pribadi atau ahli warisnya atau badan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah yang menerima penyerahan atau yang dapat dianggap menerima penyerahan kendaraan wajib melaporkan secara tertulis kepada instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya: a. 14 (empat belas) hari sejak penyerahan terhadap kendaraan baru; b. 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan terhadap Kendaraan yang terdaftar di Daerah atau sejak diterbitkannya dokumen administrasi pemindahan tempat pengoperasian kendaraan terhadap kendaraan pindahan yang terdaftar di Daerah lain atau bagi kendaraan yang dianggap sebagai penyerahan.

Setiap kendaraan yang mengalami perubahan serta penggantian body, spesifikasi teknik dan/atau penggantian mesin wajib melaporkan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya dokumen administrasi dan perubahan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya. Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pemasukan Kendaraan dari luar daerah harus dilengkapi bukti pelunasan PKB dan BBNKB dari daerah asalnya berupa Surat Keterangan fiskal antar daerah. Orang pribadi, Badan, Pemerintah / TNI / Polri, Pemerintah Daerah yang menyerahkan Kendaraan wajib melaporkan kepada instansi yang ditunjuk di Daerah atas terjadinya penyerahan hak

¹⁴ *Ibid*, Pasal 27 s.d. Pasal 30.

milik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan kendaraan.

Laporan penyerahan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya memuat : a. nama dan alamat lengkap orang pribadi, badan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah yang menyerahkan dan menerima penyerahan; b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan; c. nomor polisi kendaraan bermotor; d. lampiran fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor; e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal. Wilayah pemungutan Pajak adalah di Wilayah Daerah.

d. Saat Terutang BBNKB :¹⁵

Saat pajak terutang adalah sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

e. Penetapan BBNKB:¹⁶

Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya Pajak BBNKB, dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bentuk isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pelanggaran batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak BBNKB.

Tetapi hal ini dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang

¹⁵ *Ibid*, Pasal 31.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 32 dan Pasal 33.

Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Maka Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak perlu lagi.

III. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

a. Nama, Objek dan Subjek PBBKB :¹⁷

Pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dinamakan PBBKB.

Objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor di Daerah. Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan, yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.

b. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Perhitungan PBB-KB:¹⁸

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

¹⁷ *Ibid*, Pasal 34 s.d. Pasal 36.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 37 s.d. Pasal 39.

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.

c. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, dan wilayah pungutan:¹⁹

Pemungutan pajak dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak dimaksud dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Tata cara pemungutan PBBKB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetor hasil pemungutan PBBKB pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSPD berdasarkan angka sementara paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah diperoleh angka penjualan pasti, pada masa pajak berikutnya penyedia bahan bakar kendaraan bermotor harus melakukan penyesuaian terhadap perhitungan sementara yang telah disetor. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SSPD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan SPTPD kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyetoran pokok PBBKB yang terutang. SPTPD antara lain memuat volume penjualan, wilayah lembaga penyalur dan konsumen langsung, serta jumlah pajak yang telah disetor. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Wilayah pungutan pajak adalah di Wilayah Daerah,

¹⁹ *Ibid*, Pasal 40 s.d. Pasal 43.

d. Masa Pajak Dan Saat Terutang PBBKB:²⁰

Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan kalender. Saat terutangnya PBBKB adalah sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKPD diterbitkan berdasarkan Surat atau dokumen penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

e. Penetapan PBBKB:²¹

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menghitung dan memperhitungkan PBBKB terutang dalam masa pajak. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PBBKB yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah PBBKB yang terutang.

²⁰ *Ibid*, Pasal 44 dan Pasal 45.

²¹ *Ibid*, Pasal 46 dan Pasal 47.

c. SKPDN jika jumlah PBBKB yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.

Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan PBBKB tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika penyedia bahan bakar kendaraan bermotor melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.

Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Maka Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak perlu lagi.

B. Upaya-Upaya Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam Memotivasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Warga negara yang baik, sudah seharusnya sadar dan taat pajak. Sadar pajak tidak hanya diartikan taat membayar pajak, namun diharapkan bisa paham dan mengerti terkait pajak. Masyarakat juga harus sadar berapa pajak yang telah dipungut dialokasikan kembali untuk pembangunan. Saat ini pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, karena pajak sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian. Menyadari akan hal itu, pemerintah selalu menggalakkan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Indonesia adalah pajak. Pembayaran pajak sangat penting bagi negara untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, serta untuk kesejahteraan rakyat.

Peran pajak sangat besar dalam suatu negara, termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang yang menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi keuangan negara tanpa kontribusi dari pajak sebagai sumber utama penghasilan bagi keuangan negara. Pembangunan tidak dapat dijalankan apabila sumber pendanaannya tidak tersedia. Kesulitan pendanaan pembangunan akan mengakibatkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan.

Pentingnya pajak bagi pembangunan tidak diikuti dengan kepatuhan membayar pajak. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 masih tergolong sangat rendah, Rendahnya kepatuhan membayar pajak juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan kepatuhan wajib pajak penghasilan dalam membayar pajak telah berlangsung dari tahun ke tahun.

Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan namun masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi wajib pajak disebabkan oleh banyak hal seperti besaran penghasilan, tingkat pendidikan, isu korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak termasuk motivasi wajib pajak tentang kewajiban pembayaran pajak.

Adapun Upaya-Upaya Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Memotivasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak ialah :

1. Sebagaimana disebutkan yang dimaksud dengan motivasi adalah suatu hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu.
2. Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. motivasi dari wajib pajak adalah kesadaran pajak dari wajib pajak, tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak.
4. bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak.
5. Motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan kuesioner yang digunakan untuk mengukur motivasi adalah :²²

- a) Kesadaran pajak dari wajib pajak,
- b) Kejujuran wajib pajak,
- c) Hasrat wajib pajak.

²² Wawancara di masyarakat tentang motivasi membayar Pajak tanggal 2 Mei 2017

Disamping faktor motivasi, sikap rasional memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti adanya pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, yang ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. bahwa sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, faktor sikap rasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti persepsi yang baik tentang sistem perpajakan. persepsi yang baik atas efektifitas pajak itu sendiri berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, faktor-faktor seperti motivasi, sikap rasional dan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. dengan menambahkan variabel sikap rasional dan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, seharusnya diiringi

dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Diharapkan kebijakan penghapusan denda pajak yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. dan pembebasan BBNKB dapat mendorong masyarakat untuk wajib pajak Kendaraan Bermotor segera melunasi pajaknya

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ialah Faktor Kesadaran masyarakat, Faktor meningkatkan kewajiban moral wajib pajak, dan Faktor pengetahuan tentang pajak.
3. Upaya-Upaya Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Memotivasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Dalam Memotivasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak ialah Sebagaimana disebutkan yang dimaksud dengan motivasi adalah suatu hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu. Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. motivasi dari wajib pajak adalah kesadaran pajak dari wajib pajak, tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam

membayar pajak. bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak. Motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan kuesioner yang digunakan untuk mengukur motivasi adalah Kesadaran pajak dari wajib pajak, Kejujuran wajib pajak, Hasrat wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, 1987. Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press.
- Achmad Tjahyono & Muh. Taufik Husein, 2002. Perpajakan di Indonesia; Yogyakarta : YKPM.
- Amir Santoso, 1992. Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Jakarta : Gramedia.
- Amrah Muslimin, 1982. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung : Alumni.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arifin P Soeria Atmaja, 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Disertasi, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Connolly, Sara and Alistair Munro, 1999. *Economics of The Public Sector*, New York: Prentice Hall.
- Davey, K.J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah:Praktek-praktek linternasional dan Relevansinya Bagi DUnia Ketiga, diterjemahkan oleh Amanullah, Jakarta:UI Press.
- Dye., Thomas R. 1978. *Understanding public policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Easton, David. 1953. *The Political System*, New York: Knopf.
- Erly Suandi, 2000. Hukum Pajak, Jakarta : Salemba Empat.
- Eti Rochaety, dkk. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Bumi Akara, Jakarta, 2010.
- Friedrick, Carl J. Friedrich, 1963. *Man and His Government*, New York: Mc Graw Hill.
- George C. Edwards III, Ira Sharkansky, 1978. *The Policy Predicament*, San Fransisco: W.H. Freeman and Company,.
- Guritno Mangkoesoebroto, 1998. *Ekonomi Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Ibnu Syamsi, 1993. Diktat Kuliah Kebijaksanaan Publik dan Pengambilan Keputusan, Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Irawan Soejito, 1981. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta : Bina Aksara.
- Jenkins, W.I. 1978. *Public Analysis*, Oxford: Martin Robertson.

- Jhingan, Ml. 1994. *Macroeconomics Theory, second edition*, India: Vrina.
- J. Kaloh, 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Jakarta : Rineka Cipta.
- J.S. Badudu, 1994. Sutan Mohammad Zen, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Krishna D. 2003. Darumurti, Umbu Rauta, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Laswell, Harold D., Abraham Kaplan, 1970. *Power and Society*, New Haven: Yale University Press.
- Miyasto, 1991. Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai. Studi Mengenai Dampak terhadap Harga, Penerimaan dan Struktur. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muqodim, 1999. Perpajakan Buku Satu, Yogyakarta : UII Press.
- R. Kaho, 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rochmat Soemitro, 2004. Asas dan Dasar Perpajakan 2. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ildhal Kasim et.al., Jakarta : Elsam dan Huma.
- R. Santoso Brotodihardjo, 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet Pertama Edisi Keempat, Bandung: PT. Refika Aditama.
- R. Tresna, tt. Bertamasya Ke Taman Ketatanegaraan, Dibya : Bandung.
- Sally M. Jones, 2002. *Principles of Taxation*, New York:Mc Graw Hill.
- Santoso Brotodihardjo, 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT Eresco.
- Sommerfeld *et al.* 1994. *Concepts of Taxation*, San Diego: The Dryden Press.
- Sujamto, 1979/1980. Latar Belakang Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab Dititikberatkan Pada Daerah Tingkat II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan, Jakarta : Departemen dalam Negeri.

Udoji, Chief J.O. 1981. *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*, Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.

Yosef Riwu Kaho, 1991. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta : FISIPOL Universitas Gajah Mada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 TAHUN 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.

Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 Tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah